

Sosialisasi Tugas Pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui Program *Open Ship Day*

¹Warsidah, ²Ikha Safitri, ³Mega Sari Juane Sofiana, ⁴Arie Antasari Kushadiwijayanto, ⁵Yusuf Arief Nurrahman, ⁶Shifa Helena, ⁷Syarif Irwan Nurdiansyah, ⁸Edwin Suryahadie
^{1,3,4,5,6,7,8}Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak
²Stasiun PSDKP Pontianak, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kubu Raya
Email Corresponding: isafitri@marine.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: PSDKP Pengawasan <i>Open Ship day</i> Kelautan Perikanan	Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan tingkat keanekaragaman tinggi. Potensi tersebut sangat penting dan strategis sebagai tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan nasional. Di sisi lain, perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor andalan yang dapat diberdayakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut secara berkelanjutan, diperlukan adanya suatu pengawasan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan dan kelautan di perairan Indonesia. Dalam rangka bulan bakti, PSDKP membuka program <i>Open Ship Day 2023</i> , yang menerima kunjungan dari masyarakat umum, instansi, maupun akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat untuk mengenal lebih dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan dalam kegiatan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPPNRI 711). Kegiatan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2023. Sosialisasi tugas pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak dilakukan melalui diskusi interaktif selama pelayaran dengan Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa tentang tugas pokok PSDKP Pontianak di wilayah WPP 711 meliputi Laut Natuna, Natuna Utara, dan Selat Karimata. Selain itu, peserta juga memahami strategi dalam usaha menangkap pelaku illegal fishing oleh tim Kapal Pengawas pada saat patroli berlangsung.
Keywords: PSDKP Monitoring <i>Open Ship day</i> Marine Fisheries	ABSTRACT Indonesia as a maritime country has the potential for fisheries and marine resources with a high level of diversity. This potential is very important and strategic as a basis for realizing the pillars of national development. On the other hand, fisheries and marine is one of the mainstay sectors that can be empowered to improve the welfare of the Indonesian community. In order to utilize the potential of marine and fisheries resources in a sustainable manner, monitoring is required. The Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP), is responsible for maintaining the sovereignty of fisheries and marine management in Indonesian waters. In order of Marine and Fisheries Bulan Bakti, PSDKP organized the <i>Open Ship Day 2023</i> program, which welcome to public community, agencies and academics from several universities in West Kalimantan. This program aimed to get more knowledges of monitoring activities of marine and fisheries vessels in Fisheries Management Areas (WPPNRI 711). The activity was carried out on 24 th October 2023. Socialization of the main duties and functions of PSDKP Pontianak was carried out through interactive discussions during the cruise on the ship of Hiu Macan 01. The results showed an increase in students' understanding of the main duties and function of PSDKP Pontianak in carrying out monitoring in the WPP 711 area including Natuna Sea, North Natuna and Karimata Strait.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim, memiliki luas wilayah laut mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sepanjang 12 mil. Sebagai aset nasional, perairan laut Indonesia memiliki manfaat penting sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, area perdagangan, serta wilayah pertahanan keamanan. Perairan laut yang sangat luas tersebut menyimpan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan tingkat keanekaragaman tinggi. Potensi di sektor perikanan tangkap, meliputi ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udang, dan kekerangan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis sebagai tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan nasional. Di sisi lain, perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor andalan (*leading sector*) yang dapat diberdayakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dari pemanfaatan potensi tersebut, perlu usaha melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk lingkungan perairannya, dan juga meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut secara berkelanjutan, diperlukan adanya suatu pengawasan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok khusus untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), maka dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, PSDKP Pontianak melaksanakan kegiatan *Open Ship Day 2023*. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, instansi, maupun akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat mengenal lebih dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan dalam kegiatan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711). Kesempatan berkunjung ke Stasiun PSDKP Pontianak menjadi momentum bagi dosen dan mahasiswa Ilmu Kelautan UNTAN untuk mengenal tupoksi pengawasan potensi kelautan dan perikanan yang menjadi peran utama dari PSDKP, khususnya di Kalimantan Barat pada zona WPP 711 yang meliputi wilayah perairan Laut Natuna, Natuna Utara, dan Selat Karimata.

II. MASALAH

Kalimantan Barat memiliki total panjang garis pantai ±1.398 km dengan luas wilayah laut 30.364,59 km², terdapat juga 226 pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni (Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, 2019). Perairan Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang memiliki tingkat keanekaragaman tinggi. Selain itu, Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis sebagai tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan nasional. Di sektor perikanan tangkap, pada tahun 2019, total produksi perikanan tangkap Kalimantan Barat sebesar 169.094 ton dan mengalami peningkatan menjadi 195.493 ton pada tahun 2021 (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Potensi tersebut menjadi salah satu sektor andalan dalam membangun perekonomian Indonesia. Di dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan, diperlukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan potensi yang ada. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak sebagai perpanjangan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja WPP 711 yang meliputi Laut Natuna, Natuna Utara dan Selat Karimata, memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020. Dalam menjalankan tugas tersebut, tentunya memerlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan instansi terkait. Dalam rangka bulan bakti Kelautan dan Perikanan, PSDKP Pontianak membuka program *Open Ship Day 2023*, dengan menerima kunjungan dari instansi terkait dan masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan.



Gambar 1. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Kalimantan Barat

III. METODE

Kegiatan *Open Ship Day* dilaksanakan dalam rangka bulan bakti Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober 2023 dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 23-24 Oktober 2023. Dalam kegiatan tersebut, PSDKP menerima kunjungan pelajar dan mahasiswa ke kapal dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat kapal pengawas kelautan dan perikanan. PSDKP melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi, kegiatan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711), aktivitas *illegal fishing*, hingga penangkapan kapal perikanan yang melakukan praktek IUU *Fishing*.



Gambar 2. Flyer *Open Ship Day* 2023 dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat

Tahapan kegiatan *Open Ship Day* 2023 dalam rangka bulan bakti kelautan dan perikanan di PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat antara lain :

1. Persiapan

Persiapan kegiatan dilakukan dengan pendaftaran peserta ke pihak stasiun PSDKP Pontianak. Peserta kunjungan yaitu 5 dosen dan 20 mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan, FMIPA, Universitas Tanjungpura. Setelah itu, pihak pelaksana akan menyampaikan informasi mengenai jadwal kunjungan

2. Pelaksanaan

Kunjungan ke Stasiun PSDKP dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Jl. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Edwin Suharyadie, S.Pi. selaku Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana. Selanjutnya, peserta diajak naik ke kapal Hiu Macan 01, melihat bagian-bagian kapal pengawasan beserta fungsinya, diberikan penjelasan, serta melakukan pelayaran hingga ke perairan muara Sungai Kakap. Selama pelayaran, tim PSDKP dengan diskusi interaktif memberikan pemaparan mengenai tugas pokok dan fungsi, kegiatan pengawasan yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711), aktivitas *illegal fishing*, hingga penangkapan kapal perikanan yang melakukan praktek IUU *fishing*.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi kunjungan dalam rangka sosialisasi tugas pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak Melalui Program *Open Ship Day 2023* dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan oleh tim pelaksana terkait materi yang telah dipaparkan selama pelayaran. Bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, diberikan hadiah (*gift*) oleh panitia pelaksana

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak memiliki visi bahwa perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, stasiun PSDKP Pontianak memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020. Sedangkan fungsi PSDKP, antara lain:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok Masyarakat pengawasan;
4. Pelaksanaan penyiapan logistic dan pemeliharaan kapal pengawasan perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 3. Penyambutan peserta oleh Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat



Gambar 4. Penyampaian materi oleh Tim Kapal Pengawas Hiu Macan 01

Armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dioperasikan oleh Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah tujuh (7) unit. Berdasarkan klasifikasi kapal pengawas perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/PERMEN-KP/2021, sebanyak dua (2) unit kapal masuk ke dalam kategori kelas III dan lima (5) unit kapal kelas V. Wilayah operasi kapal pengawas kelas III meliputi seluruh WPPNRI 711, sedangkan untuk kapal pengawas kelas V yaitu di pesisir Kalimantan Barat dan WPP PD 435 Sungai Kapuas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas kelautan dan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemdiproses lebih lanjut. Pada saat kegiatan, peserta diajak naik dan berlayar menggunakan kapal pengawas Hiu Macan 01, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. LoA : 36 meter (kelas III)
- b. Bahan : *Fiber Reinforced Plastic (FRP)*
- c. Mesin utama : 3 x 1100 hp (MAN)
- d. Mesin bantu : 2 x 100 kVa (Baudoin)
- e. Kecepatan maks : 27 knot
- f. Tahun : 2004
- g. Jumlah awak : 18 orang
- h. Wilayah operasi: WPPNRI 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara)



Gambar 5. Kapal Hiu Macan 01 sebagai Armada Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kapal pengawas perikanan dilengkapi dengan beberapa alat bantu navigasi dan komunikasi. Alat bantu navigasi antara lain radar, echosounder, *Global Positioning System (GPS)*, ecdis, AIS, dan clinometer. Sedangkan, alat bantu komunikasi berupa radio VHF, radio SSB, telepon satelit dan *handy talky*. Selain alat standar navigasi dan komunikasi, kapal pengawas dilengkapi

dengan senjata laras panjang jenis SS2 dan PM1. Senjata tersebut digunakan apabila pada saat pelaksanaan operasi ditemukan pelaku *IUU Fishing* yang melawan dan dapat membahayakan petugas. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sanksi yang diberikan kepada pelaku dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Apabila memenuhi unsur pidana di bidang Kelautan dan Perikanan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Sanksi administrasi diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa penghentian operasi, pencabutan izin berusaha, dan denda. Hal ini tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Kegiatan operasi kapal pengawasan dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

1. Target Hari Operasi

Target hari operasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP dalam Indikator Kinerja Utama Eselon I

2. Ketersediaan Anggaran Operasi

Anggaran terbesar dalam pelaksanaan operasi kapal pengawas adalah kebutuhan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, pada saat harga minyak sedang mahal maka kemungkinan target hari operasi kapal pengawas kemungkinan tidak akan tercapai

3. Target Operasi

Dengan keterbatasan anggaran maka untuk operasi kapal pengawas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebelum operasi dilaksanakan, pengawas perikanan akan membuat rencana operasi. Rencana operasi yang disiapkan berisi peta kerawanan dan data cuaca

4. Laporan Pengaduan

Kegiatan operasi pengawasan rutin dan terencana, kapal pengawas akan beroperasi ketika ada laporan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kejadian tindak pidana kelautan dan perikanan ataupun kegiatan lain yang dinilai melanggar aturan peraturan dan perundangan-undangan



Gambar 6. Foto bersama Ilmu Kelautan UNTAN dengan PSDKP Pontianak

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, dimana tim PSDKP memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta dari Program Studi Ilmu Kelautan UNTAN. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tim peserta telah memahami tentang tugas pokok dan fungsi Stasiun PSDKP dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan untuk sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kunjungan *Open Ship Day* 2023 menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa tentang tugas pokok Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak di wilayah WPP 711 meliputi Laut Natuna, Natuna Utara, dan Selat Karimata. Selain itu, peserta juga memahami strategi dalam usaha penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh tim Kapal pengawas pada saat patroli berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Kalimantan Barat atas kesempatan kunjungan yang telah diberikan kepada Program Studi Ilmu Kelautan UNTAN dalam rangka program *Open Ship Day* 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2021. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2021. 782 pp.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang